

BAB II

PROFIL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisikan informasi mengenai objek penelitian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi tersebut antara lain berupa profil, peran dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2.1 Profil

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan kementerian Indonesia yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan persoalan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika. Berdasarkan situs resminya, Kementerian Kominfo yang dikenal sekarang merupakan pembentukan kembali dari Departemen Penerangan RI yang pada saat itu dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifoeddin pada tahun 1945. Namun, seiring berjalannya waktu, Departemen Penerangan mengalami dinamika perubahan sampai pada akhirnya ditetapkan menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono silam. Kementerian Kominfo saat ini dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard Plate.

Berdasarkan hasil Sidang Kabinet Paripurna, Visi dan Misi kementerian saat ini mengikuti Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin (CNN Indonesia, 2019). Oleh karena itu, sesuai dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 (2021: 37), Kementerian Kominfo berupaya menjadi Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melayani Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misinya, yakni “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”.

Mengacu dari Permen Kominfo RI No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 (2021: 39), Kementerian Kominfo memetakan fokus pembangunan nasional ke dalam 3 tujuan utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital pada aspek bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang didukung oleh sumber daya manusia dengan kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Serangan siber berupa pencurian data, *phising*, dan peretasan adalah kasus yang beberapa tahun ke belakang sering terjadi di era kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pandemi Covid-19 turut berkontribusi terhadap lonjakan kasus serangan siber akibat kenaikan angka pengguna internet dan transaksi secara daring (Warsino, 2021). Permasalahan dalam dunia siber seperti jual-beli data pribadi, perjudian ilegal, dan konten negatif, tentunya memiliki efek kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah diperlukan dalam mendukung terciptanya keamanan siber dan sistem elektronik yang andal untuk mewujudkan keamanan bagi seluruh aktivitas daring masyarakat.

Dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 (2021: 82), disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan data pribadi, sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan strategi keamanan siber. Salah satu isu penting yang perlu segera ditangani adalah keamanan data pribadi, Kementerian Kominfo mempercepat pelaksanaan kebijakan Perlindungan Data Pribadi untuk memenuhi kebutuhan atas perlindungan hak-hak masyarakat. Berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 (2021: 84—85), dalam implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia, Kementerian Kominfo memiliki tugas, yakni:

- Menetapkan regulasi PDP beserta aturan turunannya

- Membentuk Badan Pelaksana PDP
- Mengembangkan Ekosistem *Data Protection Officer*.

2.2 Permasalahan

Isu Perlindungan Data

Isu perlindungan data pribadi relatif sering diperbincangkan sejak beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2020 silam, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat pernah berpesan bahwa negara memerlukan antisipasi berupa regulasi dan teknologi dalam menghadapi perkembangan perubahan digital yang relatif cepat. Regulasi dan teknologi yang dimaksud merupakan perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara. (Media Indonesia, 2020). Ketika terjadi peretasan data rekam medis pasien pada tahun 2021 silam, Anggota Komisi I DPR, Sukamta, telah memberi peringatan serupa kepada Kementerian Kominfo. Pada saat itu, Komisi I DPR menyatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali berpesan bahwa sebagai pemimpin di sektornya, peristiwa peretasan data harus dibenahi secara baik oleh Kementerian Kominfo. Namun, nyatanya peristiwa peretasan data masih saja terjadi. (Rahadi, 2022).

Berdasarkan laporan BSSN, sejak Januari 2022—September 2022 terdapat 108 juta serangan siber yang ditujukan ke Indonesia (Sadya, 2022). Ditambah terbatasnya jumlah pakar keamanan siber di Indonesia, yaitu hanya 1 dari 10 lulusan teknologi di Indonesia yang tertarik mempelajarinya. Berdasarkan SecLab BDO Indonesia terhadap talenta TI, 9 dari 10 lainnya memilih untuk menjadi *software developer*. Jika kekurangan tersebut disertai dengan rendahnya pengetahuan publik, Indonesia akan terus menjadi target serangan siber. Menurut Harry Adinanta, *Cybersecurity Director SecLab BDO Indonesia*, banyak organisasi di Indonesia yang tidak memahami atau mementingkan isu keamanan siber. (Suryo, 2022).

Pemerintah bersama Kementerian Kominfo menghadapi tantangan dalam era transformasi digital. Dibutuhkan adanya kesiapan infrastruktur digital dan SDM kompeten untuk menghadapinya, terutama jika melihat rentannya kasus peretasan data pribadi di Indonesia. Isu perlindungan data pernah disinggung oleh Komisi II

DPR Mardani Ali Sera. Ia menegaskan, penanggung jawab utama dari peristiwa pencurian data adalah pemerintah sebab pemerintah wajib memastikan keamanan data publik. Menurut Mardani, keberadaan Bjorka (*hacker*) menunjukkan sistem keamanan siber pemerintah yang lemah. (Ramli, 2022). M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik di Universitas Esa Unggul turut menilai lemahnya aturan perlindungan data Indonesia menjadi penyebab peristiwa peretasan data yang marak terjadi, dan Menkominfo harus bertanggung jawab akan isu tersebut. (Ramli, 2022).

Respons Kementerian Kominfo

Berikut di antara tanggapan yang diberikan Kementerian Kominfo atas peristiwa peretasan data yang marak terjadi pada tahun 2022. Pertama, terkait kebocoran data PLN dan Telkom pada Agustus 2022. Menurut Johnny G. Plate (Menkominfo), kebocoran data pribadi terjadi merupakan hal yang umum terjadi setiap detiknya. Menkominfo turut mengimbau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) supaya lebih memperhatikan data pengguna dan memperkuat keamanan digital masing-masing *platform*. (CNN Indonesia, 2022).

Selanjutnya terkait peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card penduduk, Kementerian Kominfo menyanggah kebocoran berasal dari pihaknya, walaupun berdasarkan klaim pelaku peretasan, jenis data, dan pakar siber, data tersebut berasal dari Kementerian Kominfo. Ketika dimintai keterangan, Menkominfo mengimbau semua pihak termasuk masyarakat agar tidak lalai dalam memberikan data pribadi dan mengubah *password* secara berkala sebagai solusi menghindari peretasan data. (Putri, 2022).

Pada 5 September 2022, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Samuel Abrijani pernah menyampaikan pesan kepada pelaku peretasan supaya tidak melakukan penyerangan data siber. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR, Dave Laksono Dalam RDP Komisi I DPR. Dave menyampaikan bahwa pelaku tidak akan berhenti hanya dengan pernyataan Samuel. Dengan anggaran yang besar, Dave juga berharap Kominfo dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kompetensinya. (Dirgantara, 2022).

Masih dalam RDP yang sama, Menkominfo menolak untuk buka suara terkait tanggapannya mengenai kebocoran data. Menurutnya, hal tersebut bukan termasuk ke dalam wewenang Kementerian Kominfo, melainkan BSSN. Setelah Menkominfo membuat pernyataan tersebut, Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra merespons bahwa isu keamanan siber sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. (Sorongan, 2022).

Tuntutan terhadap Kementerian Kominfo

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menyoroti terkait maraknya peretasan data dan mengatakan Kominfo dan BSSN perlu menjadi garda terdepan dalam keamanan siber, khususnya terkait keamanan data pribadi. Dia mengklaim bahwa isu peretasan data dapat membahayakan keamanan negara sehingga memerlukan refleksi dari pihak Kementerian dan Lembaga terkait. (Al Fiqri, 2022).

Ketika terjadi peretasan data pelanggan Indihome pada Agustus 2022, Pengamat Keamanan Data Siber, Teguh Aprianto, menunjukkan rasa prihatin sekaligus geram dengan keamanan data yang dijanjikan Kementerian Kominfo. Melalui akun Twiternya (@secgtron), Teguh menginfokan mengenai adanya kebocoran data pribadi pelanggan Indihome. Kemudian ia mengakhiri unggahan dengan meminta pertanggungjawaban Kominfo atas peristiwa peretasan yang terjadi, “Jangan tidur lu @kemkominfo” ujarnya. (Kuswarni, 2022).

Terkait peristiwa peretasan data registrasi SIM Card, pengamat keamanan siber Pratama Persadha mendesak Kementerian Kominfo untuk berterus terang menjelaskan kondisi yang terjadi. Dirinya menegaskan Kementerian Kominfo sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran tersebut. (Haryanto, 2022). Menurut Alfons Tanujaya, pakar Informasi dan Teknologi, imbauan Menkominfo kepada masyarakat untuk menjaga data pribadi dan mengganti *password*, merupakan sesuatu yang sudah dipahami publik dan meminta Kementerian Kominfo untuk melakukan introspeksi. (Putri, 2022). Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga menyampaikan hal serupa, ia menegaskan bahwa Kementerian Kominfo harus bertanggung jawab atas peristiwa kebocoran data yang terjadi. Tidak cukup hanya dengan imbauan yang diberikan, Meutya menuntut

sikap permohonan maaf dan rasa tanggung jawab Kementerian Kominfo untuk mengusut permasalahan tersebut. (Dirgantara, 2022).

Sukamta, Anggota Komisi I DPR, mengkritik sikap pemerintah yang defensif atas penanganan peristiwa peretasan data yang terjadi. Ia menilai Kementerian dan Lembaga saling mengabaikan tanggung jawab bersama padahal isu peretasan data merupakan masalah yang harus diselesaikan secara kolaboratif. (CNN Indonesia, 2022). Tanggapan Kementerian Kominfo yang minim transparansi dan terkesan melepaskan perannya dalam persoalan perlindungan data, dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kredibilitas Kementerian Kominfo.

Citra Kementerian Kominfo

Pada Agustus 2022 terjadi peretasan data penduduk yang berasal dari PLN, Indihome (Telkom), dan data registrasi SIM Card oleh pelaku yang sama (Bjorka). Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mempertanyakan peranan Kementerian Kominfo karena peristiwa peretasan data besar yang mencapai tiga kali terjadi dalam rentang satu bulan. (Dirgantara, 2022).

Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi penduduk dan mencegah serangan siber, menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, citra Kementerian Kominfo berpotensi terdampak akibat maraknya peristiwa peretasan data yang terjadi. Menyikapi peretasan data registrasi SIM Card, Sukamta Anggota Komisi I DPR, berpendapat bahwa Kementerian Kominfo dapat kehilangan kepercayaan dari publik, yakni rakyat dan perusahaan. Sukamta turut meminta Kementerian Kominfo untuk segera memberikan penjelasan secepatnya kepada publik, melakukan mitigasi risiko, serta memberikan pertanggungjawaban. (Berita PKS, 2022).

Setelah maraknya peristiwa peretasan data pribadi sepanjang tahun 2022, kompetensi Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika turut disorot publik. Hal tersebut dikarenakan beberapa pernyataannya kontroversial dalam menanggapi peristiwa peretasan data, seperti menitikberatkan pada PSE yang tidak bisa menjaga data klien-kliennya. (Pinter Politik, 2022). Pengamat

kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, menyoroti terkait rencana Presiden Joko Widodo yang pada saat itu akan melakukan *reshuffle* kabinet. Menteri Kominfo, disebut Trubus menjadi salah satu Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Menteri yang layak di-*reshuffle*. Menurut Trubus hal tersebut dikarenakan minimnya kompetensi Menkominfo di bidang Komunikasi dan Informatika. (Santia, 2022).